

Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary)

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 menandai Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menyelesaikan Rencana Kinerjanya dari tahun kedua Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2010-2014 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011. Implementasi Rencana Strategis 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2011 diupayakan dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, khususnya dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Hasil kinerja 2011 Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam mengemban amanah selama satu tahun anggaran, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Makassar (LAKIP) Tahun 2011 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Makassar selama Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga yudikatif sebagai salah satu pelayan publik dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

LAKIP Tahun 2011 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi dirinya maupun selaku kawal depan (*porvoost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 24 Satker yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Keberhasilan di bidang manajemen dan pelayanan serta penyelesaian perkara tentu bukan hanya keberhasilan dari komponen para tenaga Teknis Pengadilan Tinggi Agama Makassar semata, tetapi juga menggambarkan

keberhasilan seluruh komponen, dukungan *supporting unit* serta partisipasi stakeholder PTA Makassar secara umum.

Mewujudkan aparaturnya yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Agama Tinggi Makassar secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Capaian Kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Makassar 2011**

Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi
Jumlah perkara Banding yang diselesaikan	118 perkara	146 perkara
% Tunggakan perkara Tk Banding	10 %	4 %
% Tunggakan perkara Tk. Pertama (24 satker)	10 %	12 %
% Penyerapan Anggaran (25 satker)	95 %	97,4 %
% Pelaksanaan Justice For All (24 satker)	100 %	67 %
Pembinaan dan Pengawasan	100 %	93 %
Pelaksanaan Transparansi Informasi	25 satker	25 satker
Implementasi SIADPA & SIADPTA (25 satker)	100 %	100 %
% Pelaksanaan meja informasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat	25 satker	25 satker

Keberhasilan ini dicapai karena terpenuhinya sasaran-sasaran strategis lainnya yang ikut mendorong. Sasaran strategis tersebut diantaranya terwujudnya sistem pengawasan yang terencana dan efektif, terwujudnya sistem koordinasi dan pembinaan yang memadai, meningkatnya kinerja dan profesionalisme aparat peradilan, meningkatnya sistem administrasi dan manajemen peradilan dan terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana hukum yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2011 oleh segenap jajaran hakim/pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan secara keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerja pada masa mendatang.

Sebaliknya capaian kinerja yang belum secara optimal direalisasikan pada tahun 2011 antara lain pada sasaran :

- Terpenuhinya kelengkapan berkas perkara banding
- Tersedianya bahan evaluasi atas alur kerja dan SOP secara periodik
- Dibentuknya koordinator Tim Informasi Teknologi pada setiap satker yang menangani WEB, SIADPA, SIADPTA.
- Dibuatnya program dalam pengelolaan administrasi perkara serta target yang ingin dicapai agar dapat dilakukan evaluasi kinerja
- Dilakukannya monitoring pengelolaan administrasi perkara secara periodik
- Setiap satker telah melaksanakan anonimisasi putusan sebagai bahan publikasi minimal 70 % dari jumlah perkara yang diputuskan dalam satu tahun.
- Setiap satker telah memiliki media publikasi putusan yang dapat diakses pencari keadilan
- Setiap satker telah mempunyai petugas khusus untuk publikasi putusan yang memahami KMA 1-144/SK/I / 2011
- Setiap satker mempunyai elektronik dokumen untuk kepentingan / pengembangan arsip elektronik dan persiapan upaya hukum di Mahkamah Agung
- Dilakukannya reward bagi satker yang telah melampaui target penyelesaian publikasi putusan pada media WEB secara berkala
- Diselenggarakannya orientasi mediasi bagi hakim pengadilan tingkat pertama secara bertahap
- Diselenggarakannya orientasi manajemen kepemimpinan bagi pejabat struktural di pengadilan tingkat pertama
- Dilakukannya eksaminasi berkas secara berkala

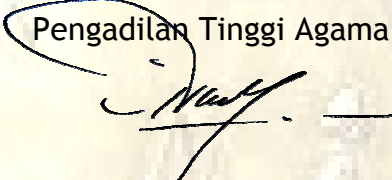
- Dibuatnya laporan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi kinerja
- Dilakukannya Evaluasi terhadap standar pelayanan dan standar informasi pada setiap satker secara berkala dan berkesinambungan
- Ditetapkannya standar pelayanan pengajuan upaya hukum pada tingkat pertama serta penyelesaian pada tingkat banding
- Dilakukannya pelaporan secara berjenjang dalam rangka akuntabilitas pelaporan
- Dilakukannya visualisasi pelaporan yang layak untuk dipublikasikan pada masyarakat sesuai pedoman publikasi informasi
- Dilakukannya evaluasi dan analisa data atas pelaksanaan mediasi pada setiap satker pengadilan tingkat pertama
- Dibuatnya program optimalisasi pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2008
- Melakukan Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait atas pelaksanaan sidang keliling, prodeo dan posbakum
- Membuat program kerja kelompok diskusi, kelompok kerja dalam rangka peningkatan SDM
- Melakukan resume hasil diskusi sebagai bahan pedoman kerja
- Melakukan evaluasi pada Sub Kepegawaian, Umum, Keuangan secara berkala dalam rangka pemantapan *Supporting Unit* pada setiap satker Se-Wilayah PTA Makassar
- Melakukan evaluasi kinerja pelayanan perkantoran PTA dan PA Se-Wilayah PTA Makassar
- Membuat perencanaan standarisasi kemampuan SDM wilayah PTA Makassar.
- Menempatkan tenaga pengelola berbasis keahlian (*the right man on the right place*)
- Membuat Program optimalisasi pemanfaatan Teknologi dalam penyelesaian setiap pekerjaan.
- Membuat rancangan Program Kaderisasi pegawai
- Membuat rancangan pola karir pegawai
- Menetapkan pola karir pegawai dengan basis kualitas kinerja
- Membuat Pembuatan Data base pegawai dengan basic keahlian

- Melakukan rancangan system monitoring hakim pengawas bidang satker Se-wilayah PTA Makassar
- Membuat rancangan standar kerja anggaran berbasis kinerja
- Menetapkan sasaran anggaran berbasis kinerja
- Melakukan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pada akhir tahun
- Penyediaan Rumah Dinas
- Terciptanya kualitas dan standarisasi Jabatan & Pejabat
- Terlaksananya barometer pegawai melalui satker

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh komponen aparatur Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Makassar


Drs. H.M. Hasan H. Muhammad, SH.MH

Nip. 19470208 196712 1010